

BC

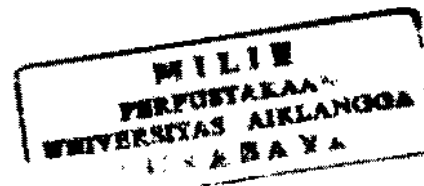
**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
MYANMAR DALAM MENGHADAPI PEMBERANTASAN
PEREDARAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

FIS HI 23/05

Sup

P



Oleh :

DINA YULIARTI SUPRIHATININGSIH

NIM. 079715529

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
MYANMAR DALAM MENGHADAPI PEMBERANTASAN
PEREDARAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh :

**DINA YULIARTI SUPRIHATININGSIH
NIM. 079715529**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juni 2005

Dosen Pembimbing



Drs. Ajar Triharso, M.S

NIP.131 289 504

Ketua Program Studi HI



Drs. Basis Susilo, M.A

NIP.130 937 977

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**“Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia-Myanmar Dalam Menghadapi
Pemberantasan Peredaran Narkotika”**

Telah dipertahankan di depan komisi penguji pada hari

Jum'at, 22 Juli 2005

Pukul 09.00

Komisi Penguji

Ketua



Dra. Lilik Salamah, M.Si

NIP.131 569 360

Anggota



Drs. Djoko Sulistyono, M.S

NIP.131 453 807

Anggota



Joko Susanto, S.IP

NIP.132 276 195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**“Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia-Myanmar Dalam Menghadapi
Pemberantasan Peredaran Narkotika”**

Telah dipertahankan di depan komisi penguji pada hari

Jum'at, 22 Juli 2005

Pukul 09.00

Komisi Penguji

Ketua



Dra. Lilik Salamah, M.Si

NIP.131 569 360

Anggota



Drs. Djoko Sulistyono, M.S

NIP.131 453 807

Anggota



Joko Susanto, S.IP

NIP.132 276 195

ABSTRAKSI

Kawasan Asia yang dikenal dengan sebutan “Segitiga Emas” (Thailand, Laos dan Myanmar) sudah dikenal lama sebagai salah satu kawasan produsen narkotika di dunia. Keberadaan opium di Myanmar bukan merupakan tanaman asli. Tanaman ini baru ada sejak jaman kolonial Inggris pada tahun 1891, dimana tanaman opium diambil dari India dan ditanam secara besar-besaran di Myanmar.

Di Indonesia, narkotika sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Indonesia dipandang sebagai pasar yang menguntungkan bagi peredaran narkotika karena Indonesia dapat dijadikan sebagai negara transit bagi negara lain (dalam hal ini Myanmar) untuk mengedarkan narkotika. Myanmar sebagai negara konsumen narkotika. Setelah kemerdekaannya, pemerintah RI dan pemerintah Myanmar berupaya menanggulangi narkotika dengan membuat sejumlah Undang-Undang, kebijakan dan program menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi narkotika. Pemerintah RI membuat instruksi No.6 tahun 1971 dan Inpres RI No.3 tahun 2002, sedangkan pemerintah Myanmar membentuk sejumlah kebijakan dan program.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui kebijakan pemerintah RI dan pemerintah Myanmar dalam menanggulangi narkotika serta hambatan-hambatannya. Teori yang digunakan adalah konsep Kepentingan Nasional, Konsep Kebijakan dan Teori Perbandingan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dengan data yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet dan artikel. Skripsi ini bersifat deskriptif-eksplanatif karena menjelaskan hubungan sebab akibat variabel penelitian, menguji hipotesis dan memberikan gambaran mengenai kebijakan menyangkut penanggulangan peredaran narkotika oleh pemerintah Indonesia dan Myanmar. Penelitian dibatasi dari sejak maraknya peredaran narkotika di kedua negara yakni pada tahun 1998 sampai 2004.

Kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar dalam menanggulangi narkotika dinilai kurang efektif karena dapat dilihat dari hambatan yang muncul dalam pemerintahan masing-masing negara. Indonesia mengalami lemahnya pengawasan di bandar udara, pelabuhan dan perbatasan darat, serta lemahnya penegakkan hukum. Sedangkan program penanggulangan narkotika di Myanmar seringkali berbenturan dengan keberadaan kelompok pemberontak yang melindungi lahan narkotika.

KATA KUNCI : Perbandingan, Kebijakan Pemerintah, Narkotika.